



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS SISASTER

**DINAS SOSIAL
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SISASTER (Sistem Asesmen Terpadu)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka, Dinas Sosial Kabupaten Bangka mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Pekerja Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah memperoleh sertifikat kompetensi. Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial bertanggung jawab melakukan asesmen sosial sebagai dasar dalam menentukan intervensi dan pelayanan yang tepat kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Namun demikian, pelaksanaan asesmen sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangka masih menghadapi berbagai kendala. Belum tersedianya pedoman asesmen yang baku menyebabkan proses penggalian informasi kepada PPKS dilakukan secara tidak terstruktur dan tidak komprehensif. Selain itu, proses asesmen sering kali

hanya melibatkan klien tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang relevan (significant others), sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan pemberian layanan, rekomendasi bantuan, maupun intervensi sosial yang diberikan kepada PPKS. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem asesmen yang terstandarisasi, terintegrasi, dan mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar dalam penyusunan rencana pelayanan sosial.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi **SISASTER (Sistem Asesmen Terpadu)**. Inovasi ini merupakan sistem asesmen sosial yang dirancang untuk membantu pekerja sosial dalam melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sistem sumber secara terstruktur, komprehensif, dan berbasis data sehingga pelayanan sosial yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menyediakan sistem asesmen sosial yang terintegrasi dan terstandarisasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui penerapan sistem asesmen yang komprehensif, objektif, dan terintegrasi.

b. Tujuan Khusus

1. Menyediakan instrumen asesmen sosial yang terstandar.
2. Meningkatkan kualitas penggalan informasi terhadap PPKS.
3. Menghasilkan data asesmen yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meminimalkan kesalahan dalam pemberian rekomendasi pelayanan sosial.
5. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam penanganan PPKS.

6. Meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dalam melaksanakan asesmen sosial.
7. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi SISASTER meliputi:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka.
3. Pendamping sosial.
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
5. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
7. Pemerintah Desa/Kelurahan yang terlibat dalam pelayanan sosial.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup inovasi SISASTER meliputi:

1. Identifikasi awal PPKS.
2. Pengumpulan data sosial.
3. Asesmen masalah dan kebutuhan.
4. Asesmen potensi dan sistem sumber.
5. Verifikasi dan validasi informasi.
6. Penyusunan rekomendasi pelayanan sosial.
7. Dokumentasi hasil asesmen.
8. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelayanan.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI

A. Gambaran Umum Inovasi

SISASTER merupakan sistem asesmen sosial terpadu yang digunakan oleh pekerja sosial dalam melakukan identifikasi dan analisis kondisi PPKS secara komprehensif. Sistem ini mengintegrasikan proses pengumpulan data, verifikasi informasi, analisis kebutuhan, serta penyusunan rekomendasi pelayanan sosial dalam satu mekanisme yang terstruktur.

Melalui SISASTER, asesmen tidak hanya dilakukan kepada klien, tetapi juga melibatkan keluarga, lingkungan sosial, pemerintah desa, maupun pihak lain yang relevan guna memperoleh data yang lebih akurat dan objektif.

B. Pedoman Teknis Inovasi

1. Tahap Identifikasi Awal

- a. Penerimaan laporan atau pengaduan terkait PPKS.
- b. Registrasi dan pencatatan identitas penerima layanan.
- c. Penentuan kebutuhan asesmen.

2. Tahap Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan PPKS.
- b. Observasi kondisi sosial dan lingkungan.
- c. Pengumpulan dokumen pendukung.
- d. Penggalan informasi dari significant others seperti keluarga, tetangga, perangkat desa, maupun pihak terkait lainnya.

3. Tahap Asesmen

- a. Identifikasi permasalahan sosial.
- b. Analisis kebutuhan pelayanan.
- c. Identifikasi potensi individu dan keluarga.
- d. Analisis sistem sumber yang tersedia.
- e. Penilaian tingkat risiko dan kerentanan sosial.

4. Tahap Verifikasi dan Validasi

- a. Verifikasi hasil wawancara.
- b. Validasi data lapangan.

- c. Konfirmasi kepada pihak terkait.
- d. Penyempurnaan data asesmen.

5. Tahap Penyusunan Rekomendasi

- a. Penyusunan kesimpulan hasil asesmen.
- b. Penetapan bentuk pelayanan yang dibutuhkan.
- c. Penyusunan rencana intervensi sosial.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada pihak yang berwenang.

6. Tahap Dokumentasi

- a. Penyimpanan data asesmen.
- b. Penyusunan laporan hasil asesmen.
- c. Pengarsipan dokumen pelayanan.

C. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Januari 2025
2	Pembentukan Tim	Januari 2025
3	Pemilihan Ide	Februari 2025
4	Penjaringan Ide	Februari 2025
5	Uji Coba	Maret 2025
6	Penerapan Inovasi	Maret 2025

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan SISASTER.

Indikator keberhasilan meliputi:

1. Persentase asesmen yang dilakukan sesuai standar.
2. Kelengkapan data hasil asesmen.
3. Tingkat akurasi rekomendasi pelayanan sosial.
4. Persentase pelayanan yang tepat sasaran.

5. Tingkat kepuasan penerima layanan.
6. Jumlah kasus yang berhasil ditangani berdasarkan hasil asesmen.
7. Peningkatan kualitas pelayanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

BAB III PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan inovasi SISASTER bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka, bantuan pemerintah pusat, program kerja Dinas Sosial, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi SISASTER (Sistem Asesmen Terpadu) disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan asesmen sosial yang terstruktur, objektif, dan terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangka.

Melalui penerapan SISASTER diharapkan proses asesmen sosial dapat menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif sehingga pelayanan sosial yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, profesional, serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.